



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan serentak dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Setiap Satuan Kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat. Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Barat



Ketua
Teguh Rahadjo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Visi dan Misi.....	1
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Sasaran Strategis	2
1.5. Program	2
1.6. Kegiatan.....	3
BAB II INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	5
2.1. Indikator Kinerja Kegiatan	5
2.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026	11
2.2. Anggaran 2026	24
BAB III PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Mengacu pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan. Adapun Tujuan dari Penyusunan Rencanan Kinerja Tahunan adalah: a. *Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; b. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja; c. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien; d. Terwujudnya pelayanan prima dalam melayani masyarakat; e. Menciptakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang obyektif.*

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2025-2029, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, yang juga digunakan sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

1.2. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Dengan Misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029;

- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

1.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

1.4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” Adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” Adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

1.5. Program

Rencana Kinerja Tahun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026. Rencana Kinerja Kabupaten Sumba Barat tahun 2026 mengusung 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (CQ) dan Program Dukungan Manajemen (WA).

Sasaran Program

	PROGRAM	SASARAN PROGRAM
1.	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik
		Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku
		Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
		Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan
2.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU
		Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku
		Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik

1.6. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh satuan kerja sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada berdasarkan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor SP DIPA-076.01.2.658389/2026 Tahun Anggaran 2026. Kegiatan merupakan cara untuk mencapainya (selaras dengan) sasaran dan perlu ditetapkan. Rencana Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 adalah:

- | | | |
|----|------|---|
| 1. | 3355 | Pengelolaan Keuangan |
| 2. | 3357 | Manajemen Perencanaan dan Organisasi |
| 3. | 3358 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia |
| 4. | 3360 | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana |
| 5. | 7018 | Data pemilih berkelanjutan |
| 6. | 3363 | Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan |
| 7. | 6639 | Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada |

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat juga merencanakan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 namun tidak tersedia sumber daya dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2026 yang meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pengelolaan Data dan Informasi
3. Pengelolaan Laporan dan Dokumentasi Logistik dan Pemilihan
4. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Barang Milik Negara
5. Pemeriksaan Internal KPU

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang merupakan satuan kerja dari Unit Komisi Pemilihan Umum mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan berupa sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas

2.1. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu Kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran strategis yang direncanakan pada Tahun 2026sebagai berikut:

1. Kamus Indikator Sasaran Strategis

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
1.	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi mandiri dan penilaian meso	Satuan : Nilai Evaluasi mandiri dan penilaian meso. Ukuran Keberhasilan: Pengukuran dalam satuan nilai evaluasi dalam kaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota

2.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di suatu institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	<u>Jumlah kesesuaian kompetensi pegawai</u> <u>Jumlah standar kompetensi</u>	
2.	Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota "Baik"	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal dari Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat kementerian/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam kemampuan mewujudkan reformasi birokrasi dalam institusi/lembaga.	Nilai indeks reformasi	Indeks Reformasi (nominal) Ukuran Keberhasilan: penilaian dengan kategori "Baik" dari indeks reformasi birokrasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota^a
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan akuntabilitas kinerja institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota^a

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
4.	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang menggambarkan opini BPK atas kinerja laporan keuangan, transparansi laporan keuangan atau wajar tidaknya pengelolaan laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Opini BPK	Opini BPK (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penilaian BPK atas laporan keuangan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ^a
5.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai keterbukaan (nominal) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ^a
6.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

No.	INDIKATOR	Sasaran Strategis	Definisi	Cara Perhitungan	Satuan dan Ukuran Keberhasilan
7.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
8.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

9.	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepengmilian yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Target DPTb} - (\text{Realisasi DPTb} - \text{Target DPTb})}{\text{Jumlah Target Pemilih DPTb yang tidak masuk dalam DPT}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan
10.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Terwujudnya Koordinasi penyelenggaraan kepengmilian yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan sesuai jadwal dan ketentuan}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku

		teknologi informasi yang terintegrasi			
11.	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan damai.	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan yang aman dan damai}}{\text{Jumlah total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berlangsung secara aman dan damai
12.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah total sengketa hukum KPU Provinsi/Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku

2.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026

Tabel 1. Rencana Kinerja KPU Kabupaten Sumba Barat

No	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90
		Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Peraturan KPU yang digunakan dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100
		Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0
		Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100
		Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0

2.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	85
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
			Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92
		Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
			Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	96%
		Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	100%

Tabel 2. Rencana Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat

No	PROGRAM	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	90
		Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Peraturan KPU yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100
		Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0
		Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100
		Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0
2.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai	Indeks Reformasi Birokrasi	85

		ketentuan yang berlaku		
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
			Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92
		Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
			Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	96%
		Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	100%

Tabel 3. Rencana Kinerja Bagian Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum			
1.	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga Yang Terjalin Kerjasama dengan KPU Sumba Barat dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	3 lembaga
		Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%
		Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemiludan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%
2.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Persentase Kegiatan Pendidikan Pemilih yang telah dilaksanakan	75%
			Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan	500

			Pendidikan Pemilih	
	Program Dukungan Masyarakat			
4.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%
		Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%
		Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kot a yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%
		Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yanTerseleksi dengan Baik	100%
		Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Transparan dan Akuntabel	100%
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Satker KPU Kabupaten	20%

			Sumba Barat yang Mampu Meningkatkan Kompetensi SDM Melalui Media Kompetensi yang Ada	
			Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	20%
			Persentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Barat yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0,5%

Tabel 4. Rencana Kinerja Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No	Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelenggaraan Pemilihan Umum			
1.	Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	100%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	0%
			Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Baik	100%
Dukungan Manajemen				
2.	Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	2 laporan
			Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 laporan
			Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%
			Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan	95%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	
			Jumlah Laporan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan	2 dokumen
		Tersusunnya formulasi kebijakan/regulasi /analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/regulasi/analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	100%
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%
		Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	100%
		Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaa keuangan	90%
3.	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%
			Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu	10%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dan Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%
4.	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 laporan

Tabel 5. Rencana Kinerja Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%
			Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%
			Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa Sengketa Hukum	100%
2.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai Dengan jadwal	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%

No	Program /Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tahapan yang ditetapkan KPU	Jumlah Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	2
			Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil)sesuai Ketentuanyang Berlaku	0%
3.	Pemeriksaan Internal KPU	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	30%
		Terwujudnya Penyelenggaran Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa (clean governance)	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%
		Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	79%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
		Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	77
		Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawasan	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap Realisasi Anggaran	50 org

Tabel 6. Rencana Kinerja Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Masyarakat				
1.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%
		Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga Yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	3 lembaga
		Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	85
			Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Melakukan pelayanan Publik secara Baik	100%
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 laporan
5.	Pengelolaan Data dan Informasi	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Persentase Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir yang disediakan oleh KPU	100%
		Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat	Persentase Satker KPU Kabupaten Sumba Barat yang Menerapkan e-Government sesuai SOP yang Berlaku	100%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Sarana dan Prasarana yang Memadai di Satker KPU Kabupaten Sumba Barat	100%

7	Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan Dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%
8	Pendataan DPT Berkelanjutan	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	23
		Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Satker KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	23

2.2. Anggaran 2026

Rencana Kerja yang terdiri dari program program dan kegiatan-kegiatan untuk mengarahkan seluruh sumber daya sebagai masukan serta menghasilkan keluaran dalam bentuk produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tahun 2026 terdiri dari 2 program dan 8 Kegiatan dengan Total anggaran pada DIPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 3.184.913.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Program Dukungan Manajemen dengan total anggaran Rp. 3.184.913.000 yang terbagi :

- 1.1. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebesar **Rp. 9.001.000** dengan rincian:

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	2.103.000
2.	Pendataan DPT Berkelanjutan	6.898.000
3.	Pengelolaan Data dan Informasi	-
	Jumlah	9.001.000

- 1.2. Sub Bagian keuangan, Umum dan Logistik, sebesar **Rp. 3.154.061.000** dengan rincian:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengelolaan Keuangan	2.693.173.000
2.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5.703.000
3.	Layanan Perkantoran	455.185.000
	Jumlah	3.154.061.000

1.3 Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum sebesar Rp. **7.689.000** dengan rincian:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	5.586.000
2.	Penguatan Kualitas Perundang-Undangan	2.103.000
	Jumlah	7.689.000

1.4 Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. **19.865.000** dengan rincian :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	17.762.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2.103.000
	Jumlah	19.865.000

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 ini merupakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Komisi Pemilihan Umum dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sumba Barat. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisien yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.